

Nomor : 1/PS-KOMPAK/6/2025
Perihal : Penyampaian Pernyataan Sikap
Lampiran : 1 bundel

Kepada Yth:

Ketua MPR RI

Presiden Republik Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia

Ketua DPR RI

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Panglima Tentara Nasional Indonesia

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menteri Hak Asasi Manusia

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri Kebudayaan

Menteri Agama

Ketua Komnas HAM

Ketua KPAI

di Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami dari KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI PERSEKUSI, DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI UNTUK KEMANUSIAAN (KOMPAK) menyampaikan Pernyataan Sikap sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral kami terhadap isu-isu yang menyangkut perlindungan anak, intoleransi, diskriminasi dan ketahanan keluarga di Indonesia.

Pernyataan ini merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam KOMPAK, yang kami harapkan dapat menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan dan tindakan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca serta menindaklanjuti Pernyataan Sikap tersebut, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Koordinator

ttd

Ir. Santiamer Silalahi, C.Me.

Email : mitokondrianusantara@gmail.com
Telp :

Pernyataan Sikap: Keadilan untuk K. Butarbutar, Hancurkan *Bullying* dan Intoleransi, Tegakkan Martabat Manusia dan Pancasila!

Kami, *Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi, Diskriminasi dan Intoleransi untuk Kemanusiaan (KOMPAK)*, menulis dengan hati yang tercabik-cabik dan kemarahan yang menggelegar atas kematian K. Butarbutar, seorang anak berusia 8 tahun, siswa kelas 2 SDN 012 Buluh Rampai, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada 26 Mei 2025. K. Butarbutar, seorang anak Kristen bersuku Batak, seharusnya sedang menggenggam pensil, tertawa riang bersama teman, dan mengejar mimpinya menjadi dokter atau pilot. Namun, nyawanya direnggut oleh penganiayaan sadis—diduga oleh lima kakak kelasnya, dengan motif kebencian berbasis agama dan suku. Hari ini, 1 Juni 2025, adalah Hari Pancasila, momen suci ketika Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyatukan bangsa dengan visi keberagaman yang menjunjung martabat manusia. Kematian K. Butarbutar adalah penghinaan terang-terangan terhadap martabat manusia dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Kematian K. Butarbutar harus menjadi peringatan nasional bahwa intoleransi bukan lagi isu elite politik atau agama, tetapi telah meracuni ruang-ruang paling dasar kehidupan kita—bahkan ruang bermain anak-anak. Ia tidak mati karena konflik bersenjata atau bom bunuh diri. Ia mati karena kebencian yang tumbuh diam-diam di lingkungan sosial, yang menyusup ke dalam mulut anak-anak, menjadi ejekan, pukulan, dan akhirnya, kematian. Ini lebih dari sekadar kasus bullying; ini adalah kegagalan moral kolektif—dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

Kami menuntut keadilan untuk K. Butarbutar dan bersumpah: *bullying*, kekerasan, dan intoleransi harus dihancurkan dari dunia pendidikan, yang tidak boleh menjadi sarang sadisme dan kebencian!

Kecaman Keras: *Bullying* dan Intoleransi adalah Penghianatan terhadap Martabat Manusia

Kami mengutuk dengan segenap jiwa bahwa *bullying*, kekerasan, dan intoleransi yang telah merampas nyawa K. Butarbutar dan mencoreng martabat manusia. Pelaku, anak-anak berusia 11-13 tahun, bukanlah musuh utama—sekali lagi, mereka bukan musuh! Mereka adalah korban dari sistem pendidikan yang ambruk, lingkungan yang meracuni, dan masyarakat yang membiarkan kebencian berkembang biak. Kami mengecam keras:

- Para pendidik yang buta terhadap *bullying*, gagal melindungi anak-anak seperti K. Butarbutar, yang seharusnya aman di sekolah.
- Orang tua yang lalai, tidak melihat tanda-tanda kebencian yang merasuki anak-anak mereka.
- Tokoh masyarakat dan agama yang bungkam, membiarkan narasi kebencian menyebar di masjid, gereja, atau warung kopi.
- Provokator kebencian, yang dengan sengaja menanamkan sadisme di hati anak-anak, mengubah mereka menjadi alat intoleransi.

Gimson Beni Butarbutar, ayah K. Butarbutar, dengan air mata dan kemarahan, menceritakan bagaimana anaknya kerap diejek karena agama Kristen dan suku Bataknya. Pada 19 Mei 2025, K. Butarbutar pulang lebih awal, mengeluh ban sepedanya sengaja dikempiskan oleh kakak kelas. Pada 25 Mei 2025, ia muntah lendir bercampur darah, dan pada 26 Mei 2025 pukul 02.00 WIB, ia meninggal di RSUD Indrasari Rengat. Autopsi mengungkap luka mengerikan: memar di perut dan tungkai, resapan darah di jaringan lemak, cairan busuk di rongga perut, dan usus buntu yang pecah—bukti kekerasan tumpul yang brutal. Sekolah seharusnya menjadi kuil martabat manusia, bukan arena sadisme yang membunuh anak-anak!

Kematian K. Butarbutar bukanlah kasus tunggal. Perusakan makam Kristen di Bantul, Yogyakarta (2025), pelarangan ibadah GKI Yasmin di Bogor (2010-2023), dan penutupan masjid Ahmadiyah di Depok (2023) adalah luka nyata pada martabat manusia. SETARA Institute mencatat 232 kasus intoleransi berbasis agama pada 2023, dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) melaporkan 12.637 kasus kekerasan terhadap anak hingga Desember 2024. Kini, seorang anak telah menjadi korban terbaru. Kami mengecam keras mereka yang membiarkan kebencian ini hidup, yang menanamkan sadisme pada anak-anak, dan yang mencoreng Pancasila dengan darah K. Butarbutar. Martabat manusia adalah jantung kemanusiaan kita, dan setiap tindakan *bullying* atau intoleransi adalah serangan terhadap jiwa bangsa!

Perkembangan Fakta Baru: Bukti Kekerasan dan Urgensi Keadilan

Berdasarkan informasi terbaru, Polres Indragiri Hulu, dipimpin AKBP Fahrian Saleh Siregar, sedang menyelidiki kasus ini dengan memeriksa pihak sekolah, guru, dan siswa. Otopsi pada 26 Mei 2025 di RSUD Indrasari Rengat, dilakukan oleh tim forensik Polda Riau,

mengkonfirmasi tanda-tanda kekerasan: memar, resapan darah, dan usus buntu yang pecah. Keluarga K. Butarbutar melaporkan dugaan *bullying* berbasis suku dan agama, dengan insiden seperti ban sepeda yang dikempiskan pada 19 Mei 2025 sebagai bukti perundungan berulang. Meski motif SARA (suku, agama, ras, antargolongan) belum dikonfirmasi, dugaan ini diperkuat oleh pernyataan keluarga dan warga. Penyidik diimbau untuk tidak terpengaruh tekanan eksternal dan mengungkapkan motif sebenarnya dalam 14 hari, karena martabat manusia tidak boleh dikorbankan oleh birokrasi yang lamban atau kepentingan kelompok!

Pancasila: Janji Suci untuk Martabat Manusia yang Diingkari

Hari Pancasila, 1 Juni 2025, adalah sumpah suci Bung Karno untuk menjaga martabat setiap manusia, tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang. Ignas Kleden (*Kompas*, 30 Mei 2017) menegaskan bahwa Pancasila adalah jalan Indonesia untuk menyerasikan agama dan negara, iman dan keadilan, cinta pada keyakinan dan hormat pada sesama. Kematian K. Butarbutar adalah pengkhianatan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menuntut penghormatan terhadap semua agama, dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menjunjung martabat manusia di atas segalanya. Intoleransi yang memungkinkan anak-anak menjadi pelaku kekerasan adalah noda pada janji suci ini. Mengacu pada konsep *civil religion* (Bellah, 1967) toleransi bukanlah sikap pasif, melainkan komitmen aktif untuk melindungi martabat manusia, menolak kebencian, dan menegakkan keadilan tanpa memihak agama tertentu. Dunia pendidikan harus menjadi benteng Pancasila, tempat anak-anak belajar menghormati martabat sesama, bukan belajar memukuli dan membenci.

Tuntutan kepada Pemerintah: Hentikan Intoleransi atau Hadapi Kemarahan Rakyat!

Kami menuntut pemerintah, sebagai penjaga Pancasila dan martabat manusia, untuk bertindak sekarang atau menghadapi kemarahan rakyat yang muak dengan ketidakadilan:

- 1. Usut Tuntas Motif Intoleransi dalam 14 Hari:** Polres Indragiri Hulu harus mengungkapkan motif kebencian agama dan suku dalam kasus K. Butarbutar, berdasarkan autopsi yang menunjukkan kekerasan sadis. Proses hukum harus transparan, menggunakan keadilan restoratif untuk pelaku anak-anak sesuai UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi tanpa mengorbankan keadilan bagi keluarga K. Butarbutar.

2. **Hapus *Bullying* dari Sekolah dalam 6 Bulan:** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus merevisi kurikulum berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menanamkan nilai Pancasila melalui cerita, seni, dan pelajaran yang mengajarkan anak-anak menghormati martabat manusia. Pelatihan wajib untuk guru guna menghentikan *bullying* berbasis identitas harus dimulai Januari 2026.
3. **Hukum Provokator Kebencian Tanpa Pandang Bulu:** Terapkan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan sanksi berat bagi siapa pun—dewasa atau anak—yang memprovokasi atau melakukan kekerasan berbasis intoleransi.
4. **Dialog Antaragama dalam 30 Hari:** Pemerintah daerah Indragiri Hulu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus mengadakan dialog terbuka, belajar dari kegagalan menangani kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah, untuk mencegah konflik dan memulihkan harmoni.
5. **Lindungi Keluarga K. Butarbutar Sekarang:** Berikan perlindungan hukum dan psikologis kepada keluarga K. Butarbutar, mencegah ancaman seperti yang dialami korban intoleransi di Yogyakarta, sesuai UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6. **Kampanye Nasional Martabat Manusia:** Luncurkan kampanye nasional pada Hari Pancasila 1 Juni 2025, menggunakan kisah K. Butarbutar sebagai pengingat bahwa *bullying* dan intoleransi adalah musuh martabat manusia, dengan target menjangkau 10 juta siswa dalam setahun.
7. **Anugerahkan K. Butarbutar sebagai ‘Duta Kemanusiaan Anak’:** Kami menuntut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk secara resmi mengakui K. Butarbutar sebagai **Duta Kemanusiaan Anak** secara anumerta pada Hari Anak Nasional, 23 Juli 2025, sebagai simbol perjuangan melawan *bullying* dan intoleransi, serta untuk menginspirasi anak-anak Indonesia menjunjung martabat manusia dan Pancasila.
8. **Transformasi Budaya Jangka Panjang:** Jawaban utama atas tragedi ini bukan hanya penegakan hukum, tetapi transformasi budaya melalui pendidikan. Kami menyerukan agar pemerintah pusat meluncurkan program nasional penataran etika kemanusiaan

(pelatihan etika nasional) bagi seluruh guru—terutama di tingkat SD dan SMP. Materi wajibnya sederhana namun mendalam: bahwa semua manusia setara, bersaudara, dan layak dihormati tanpa membedakan agama, ras, atau asal-usul. Nilai-nilai seperti ini sudah menjadi dasar hidup di negara-negara berperadaban tinggi, tetapi ironisnya, nyaris tidak diajarkan secara sistematis di negeri ini. Banyak anak justru tumbuh dalam narasi bahwa “yang berbeda adalah musuh,” karena lingkungan dewasa telah menjadi budak fanatisme agama yang membutakan kemanusiaan. Pemerintah punya kuasa, dana, dan mandat konstitusional untuk melaksanakan ini—yang belum jelas hanya satu: apakah pemerintah mau? Karena soal ini bukan soal kemampuan, melainkan soal kemauan untuk berpihak pada martabat manusia.

Seruan kepada Masyarakat: Martabat Manusia adalah Pertempuran Kita Bersama!

Kami memanggil setiap warga Indonesia—ustadz, pendeta, guru, orang tua, tetangga, dan anak-anak—untuk bertempur demi martabat manusia. K. Butarbutar adalah anak kita: matanya berbinar, tangannya menggenggam pensil, mimpinya menyentuh bintang. Kita gagal melindunginya, dan itu adalah dosa kolektif kita. Mari kita:

- Jadikan kisah K. Butarbutar sebagai pelajaran abadi. Ceritakan di masjid, gereja, warung kopi, atau meja makan. Ajarkan anak-anak kita bahwa martabat teman mereka—yang berbeda agama, suku, atau budaya—lebih berharga daripada kebencian. Sekali lagi, peluk yang berbeda, jangan pukuli!
- Hancurkan kebencian! Laporkan pesan WhatsApp, unggahan media sosial, atau omongan yang menyebar intoleransi ke polisi atau Komnas HAM. Diam adalah pengkhianatan terhadap K. Butarbutar!
- Peluk keluarga K. Butarbutar dengan doa, tangan, dan solidaritas. Dukung korban intoleransi di Yogyakarta, Bogor, dan Depok, karena martabat manusia adalah milik kita semua.
- Rayakan Hari Pancasila 1 Juni 2025 dan Hari Anak Nasional 23 Juli 2025 dengan tindakan nyata: adakan lomba mengayun angklung tentang keberagaman, nyanyikan lagu persatuan, atau duduk bersama tetangga beda agama untuk berbagi cerita sambil minum kopi.

Jika Intoleransi Berlanjut: Kami Akan Melawan, dengan Segala Cara yang Sah!

Jika *bullying*, kekerasan, diskriminasi, persekusi, dan intoleransi terus menghancurkan martabat manusia, khususnya kaum minoritas dan anak-anak-anak, kami tidak akan berdiam diri. SETARA Institute mencatat 232 kasus intoleransi pada 2023, dan Simfoni PPA melaporkan 12.637 kasus kekerasan terhadap anak hingga Desember 2024—luka nyata yang menghancurkan keluarga dan bangsa. Jika pemerintah dan masyarakat gagal, sikap kami tegas:

- **Aliansi Lintas Iman:** Kami akan membentuk gerakan lintas agama dan adat, seperti yang meredam konflik di Ambon, untuk melawan kebencian dengan kasih dan solidaritas.
- **Gugat Pemerintah:** Kami akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan, seperti advokasi untuk GKI Yasmin, dan memanfaatkan media untuk menuntut akuntabilitas. Kami juga akan melapor ke Komnas HAM dan mekanisme internasional seperti **UN Human Rights Council** jika keadilan terhalang.
- **Bangun Sekolah Aman:** Jika sekolah gagal, kami akan mendirikan sanggar belajar di setiap kampung, mengajarkan Pancasila, martabat manusia, dan cinta pada keberagaman.
- **Boikot Kebencian:** Kami akan menolak dan melaporkan provokator kebencian, baik individu maupun organisasi, di dunia nyata atau daring, untuk memutus rantai intoleransi.

Peringatan Serius: Hak Menuntut Ulang Kontrak Sosial atas Dasar Martabat Manusia

Kita semua sebagai kumpulan manusia yang secara intersubjektif bersepakat untuk bersatu dalam rumah Indonesia, memiliki hak yang secara tegas disebutkan dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “***Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.***” Maka menjadi konsekuensi kita untuk menghormati keragaman “*original-identity*” dalam ras, bahasa, agama, dan adat istiadat, yang menjadi inti persatuan Indonesia.

Namun, jika negara gagal menegakkan Pancasila sebagai jaminan martabat manusia yang dipersatukan dalam keragaman tadi, jika intoleransi, hegemoni, dominasi terus merampas hak

kami untuk hidup dan beribadah dengan damai sesuai identitasnya, jika *bullying*, kekerasan, diskriminasi, dan persekusi, terus-menerus menghantui kaum minoritas dan anak-anak-anak mereka, adalah logis **kami berhak menuntut ulang kontrak kebangsaan ini secara konstitusional**. Seperti seorang Perintis Kemerdekaan, **Johannes Latuharhary** (6 Juli 1900 – 8 November 1959) pernah memperingatkan bahwa “**ketidakadilan ideologis dapat menggoyang kesatuan bangsa**”, hari ini kami menggemakan kembali peringatan itu. Jika negara terus gagal menjamin keselamatan, martabat, dan kesetaraan warga negara—terutama anak-anak dan kaum minoritas, maka jangan salahkan rakyat jika kepercayaan terhadap negara ambruk. Dan bila kepercayaan itu runtuh, maka rakyat akan menggugat ulang kontrak sosial yang menjadi dasar berdirinya Republik ini—bukan untuk menggugat keutuhan Negara Republik Indonesia, melainkan untuk memperbarui komitmen kebangsaan berdasarkan Pancasila, agar negara tidak kehilangan kepercayaan rakyat yang menjadi dasar legitimasi demokrasi, **tidak dikubur oleh ketakutan terhadap dominasi mayoritas serta kepentingan elektoral**.

Ini bukan ancaman pemisahan, melainkan peringatan bahwa negara harus memenuhi janji Pancasila atau menghadapi krisis kepercayaan rakyat. Kami menuntut pemerintah bertindak sekarang untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan oleh siapa pun!

Kami menolak segala kekerasan dalam bentuk apa pun dan tetap berjuang dalam kerangka konstitusional.

Untuk K. Butarbutar, untuk Martabat Manusia, untuk Indonesia

Kami melihat K. Butarbutar di setiap anak: berlari di lapangan, menggambar di buku, bermimpi di bawah bintang. Kepergiannya adalah luka yang tak terperi, tetapi juga nyala api untuk perubahan. Hari Pancasila 1 Juni 2025 adalah sumpah kami untuk menegakkan martabat manusia, menghancurkan *bullying* dan intoleransi, dan membangun sekolah sebagai kuil kasih, bukan arena sadisme. Kami menyerukan agar pada Hari Anak Nasional, 23 Juli 2025, K. Butarbutar dianugerahi gelar **Duta Kemanusiaan Anak** secara anumerta, sebagai simbol perjuangan anak-anak Indonesia melawan intoleransi dan untuk keadilan bagi setiap anak yang berhak hidup tanpa takut. Negara harus menjadi benteng Pancasila, menghajar hegemoni kelompok yang meracuni bangsa. Bersama, kita ciptakan Indonesia di mana keberagaman adalah pelukan hangat, bukan tinju yang menyakiti.

PRO DEO ET PATRIA

Jakarta Timur, 1 Juni 2025.

Kami yang menyatakan,

1. Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa (GALARUWA): (**Lisnora Simatupang**)



2. Fajar Keadilan Sejahtera (FKS): (**Drs. B. Beatus Sinaga, M.M., MBA.**)



3. Kerukunan Masyarakat Adat Batak (KERABAT): (**Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.**)



4. Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA): (**Ir. Santiamer Silalahi, C.Me.**)



5. Mitokondria Nusantara (Forum Masyarakat Sains): (**Raymond Kamil, S.P.**)



6. PSM Rantau Melayu: (**Erfan Indriyawan, S.P.**)



7. HORAS BANGSO BATAK (HBB): (**Lamsiang Sitompul, S.H., M.H.**)



8. Masyarakat Hukum Adat Langkat (MHAL): (**Indra Syahputra**)

